

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Awaloedi Djamin. 2014. *“Administrasi Kepolisian Republik Indonesia”*. Bandung: kenyataan dan Harapan. Polri.
- Bahder Johan Nasution. 2020. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Burhan Bungin. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, EkoNomormi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Chairuddin Ismail. 2011. *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*. Jakarta: Merlyn Press.
- Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Nomormatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada media Group.
- Irawan Soerodjo. 2002. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya.
- Ismantoro Dwi YuwoNomor. 2015. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Nomormatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada media Group.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nana Sudjana dan Ibrahim. 2004. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sugiharto. 2022. *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri*, Surabaya : CV. Jakad Media Publsihing.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Utomo Hadi Warsito. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis

Peraturan Kepala Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. JURNAL

Ahmad Rijali. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Banjarmasin: Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin Vol. 17 Nomor. 33.

Eflando Cahaya Pradana. 2016. *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Magelang:Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang. Jurnal Varia Justicia Vol. 12. Nomor 1.

Kasman Tasaripa. 2013. “*tugas dan fungsi Kopolisiandalam peranya sebagai penegakhukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*”. jurnal ilmu hukum legal opinion. Vol. 1. Nomor 2.

Rahman Amin dkk. 2022. “*penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri*”. jurnal pengabdian kepada masyarakat. Vol.1. Nomor 1.

Tri Astuti Handayani, 2015, '*Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*', Jurnal Refleksi Hukum, Vol.9. Nomor.1.

D. INTERNET

<https://www.humaspolresmetro.com/2023/08/polres-metro-berikan-pelayanan.html>, diakses 21 November 2023 pukul 14.40 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/KePolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses 4 Desember 2023 pukul 14.15 WIB.

<https://bidkumPoldasumbar.wordpress.com/>, diakses 1 Desember 2023 pukul 12.30 WIB.

